MASYARAKAT e-ISSN: 2798-5210
Volume 4 No. 11 Maret 2025 (4074-4081) p-ISSN: 2798-5652

# Pengaruh Ukuran Pemda Dan Tingkat Efisiensi Terhadap Opini Lkpd Studi Pada Pemerintahan Daerah Lampung

## Silviana<sup>1\*</sup>, Khaerul Saleh<sup>2</sup>, Fitri Sukmawati<sup>3</sup>

Universitas Widyatama, Indonesia

Email: Silviana.msi@widyatama.ac.id1\*, Khaerul.shaleh@widaytama.ac.id2,

Fitri.sukmawati@widaytama.ac.id3

\*Correspondence:

#### **ABSTRAK**

Opini LKPD Lampung masih ada yang belum mendapatkan opini WTP pada periode tahun anggran 2015-2021. Tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran pemda dan tingkat efisiensi terhadap opini LKPD pada Pemda Lampung. Populasi pengamatan sebanyak Populasi pada penelitian ini, adalah seluruh pemda di Provinsi lampung, terdapat 16 pemerintahan daerah (kabupaten dan kota). Penelitian menggunakan data sekunder, jenis penelitian deskriptif eksplanatori dengan menggunakan alat analisis regression binery logistic. Periode penelitian dari tahun 2015 sampai 2021. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan ukuran pemda berpengaruh positif terhadap opini LKPD, artinya hipotesis diterima. Hipotesis kedua tingkat efisiensi menunjukkan pengaruh negative dengan demikian hipotesis ditolak. Walaupun ukuran pemda tidak besar dilihat dari niali asset, belum tentu LKPD tidk mendapatkan opini WTP. hasil pengukuran tingkat efisiensi pemda disimpulkan belum efisien, belum tentu LKPD tidak mendapatkan opini WTP.

Kata kunci: ukuran pemda; tingkat efisiensi; opini

#### **ABSTRACT**

Opinion LKPD Lampung still has not received a unqualified opinion in the 2015-2021 fiscal year period. The aim of the research is to test and analyze the influence of regional government size and level of efficiency on local financial statement opinions in the Lampung Regional Government. The observation population of the population in this study is all local governments in Lampung Province, there are 16 regional governments (districts and cities). The research uses secondary data, explanatory descriptive research using binary logistic regression analysis tools. The research period is from 2015 to 2021. The results of testing the first hypothesis show that regional government size has a positive effect on local financial statement opinion, meaning the hypothesis is accepted. The second hypothesis of the level of efficiency shows a negative influence, thus the hypothesis is rejected. Even though the size of the regional government is not large in terms of asset value, it does not necessarily mean that the local financial statement will not receive a unqualified opinion. the results of measuring the level of regional government efficiency concluded that it was not efficient, it does not necessarily mean that the local financial statement did not get a unqualifie opinion.

Keywords: size local government; efficiency level; opinions.

#### **PENDAHULUAN**

Pemerintah sebagai pemegang amanah dari rakyat (pemberi amanah), wajib melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik, mampu berkinerja dalam semua aspek, dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dikelola (akuntabilitas public). Wujud pertanggungjawaban seperti memberi informasi dalam bentuk laporan, mengungkapkan aktivitas yang telah dijalankan dll.

Pengaruh Ukuran Pemda Dan Tingkat Efisiensi Terhadap Opini Lkpd Studi Pada Pemerintahan Daerah Lampung

Sejalan dengan analogi teori keagenan Antony, (Widyanto, 2018), pemerintah sebagai agen, memiliki asimetri informasi dibandingkan prinsipal (rakyat), sehingga bisa saja terjadi penyimpang. Untuk meyakini bahwa apa yang sudah dipertanggungjawabkan telah sesuai dengan regulasi, rakyat perlu dibantu lembaga independen dalam memeriksa informasi yang disampaikan pemerintah melalui laporan keuangan. Di dalam undang-undang dasar 1945, pasal 23, dinyatakan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK-RI) adalah badan yang independen yang melakukan pemeriksaan keuangan negara.

Di provinsi Lampung opini atas laporan keuangan selama periode 2015 sampai 2021, beragam, masih ada yang mendapatkan opini selain WTP. Opini laporan keuangan merupakan pendapat yang diberikan oleh pemeriksa (auditor) atas laporan keuangan yang diperiksa. Di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 disebutkan opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini atas laporan keuangan yang diberikan auditor akan menambah nilai informasi dan meningkatkan kredibilitas kepada stakeholders (Zhang et al., 2016).

Penelitian terkait ukuran organisasi banyak dilakukan oleh (Kurniawanto et al., 2017). Di dalam penelitiannya dibahas bahwa organisasi yang besar memiliki beragam fasilitas dan struktur yang lebih kompleks (termasuk salah satunya lemah dalam keuangan). Pembahasan tentang besaran organisasi merupakan pembahasan terkait besar kecilnya organisasi, dan dampaknya terhadap pengelolaan organisasi. Pentingnya besaran organisasi sebagai sebuah determinan struktur dipelopori oleh Peter Blau's (1970). Menurut (Suhardjanto & Dewi, 2011) salah satu ukuran organisasi dapat diproksi dengan total aset.

Penelitian terkait ukuran pemda dan efisiensi terhadap opini menunjukkan hasil yang berbedabeda. Ukuran Pemda berpengaruh terhadap opini LKPD pernah diteliti oleh (Salsabila & Wahyudi, 2022), hasil penelitian menunjukkan, ada pengaruh. Ukuran pemda tidak berpengaruh terhadap opini telah dilakukan oleh (Rosadi & Okfitasari, 2019). Rasio Efisiensi tidak berpengaruh terhadap opini telah dilakukan oleh (Hamidayanti & Wardani, 2018). Penelitian (Destin & Arofah, 2021) menunjukkan hipotesis ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini BPK, dengan demikian ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap opini BPK. Penelitian (Kusumawati & Ratmono, 2017) menyatakan dalam penelitiannya tidak menemukan pengaruh size pemerintah terhadap opini laporan keuangan. Begitu juga dengan penelitian (Erniati et al., 2019) tidak menemukan pengaruh positif terhadap opini audit LKPD.

Disebabkan masih ada pro dan kontra hasil penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji ulang dan mendapatkan bukti empiris apakah ada keterkaitan antara ukuran perusahaan dan tingkat efisiensi terhadap opini LKPD.

## METODE PENELITIAN

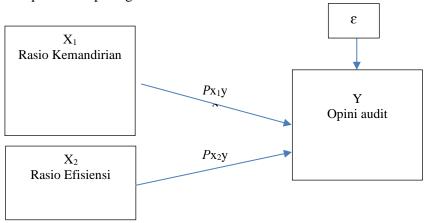
Populasi pada penelitian ini, adalah seluruh pemda di Provinsi lampung, terdapat 16 pemerintahan daerah (kabupaten dan kota). Penelitian menggunakan data sekunder, jenis penelitian deskriptif eksplanatori dengan menggunakan alat analisis regression binery logistic. Periode penelitian dari tahun 2015 sampai 2021. Observasi pengamatan (n) =  $16 \times 7 = 112$  pengamatan.

Variabel Penelitian menggunakan dua variabel independen yaitu ukuran pemda yang di proxy dengan nilai total asset yang di logistic natura (ln), kinerja pemda di proxy dengan rasio efisiensi ( lalu

Pengaruh Ukuran Pemda Dan Tingkat Efisiensi Terhadap Opini Lkpd Studi Pada Pemerintahan Daerah Lampung

hasilnya di dummy, nilai 1 jika efisien, 0 selain efisien) dan satu variabel dependen yaitu opini laporan keuangan pemda. (juga menggunakan nilai dummy, 1 untuk WTP, 0 untuk selain WTP). pengolahan data menggunakan software SPSS versi 24.

Model penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2 Model Penelitian

Adapun Persamaan regresi binery logistic sbb:

 $dumY = a + blnX_1 + bdumX_2 + \epsilon$ 

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1

		ln_X1	OPINI	DM_X2
N	Valid	98	98	98
	Missing	0	0	0
Std. Deviation		.48985	.34094	.32949
Variance		.240	.116	.109
Minimum		27.38	.00	.00
Maximum		30.10	1.00	1.00

Berdasarkan tabel 1 statitik deskriptif, terlihat sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 98 data pengamatan, dari rencana sebanyak 112 pengamatan. Dikarenakan hasil pengujian binery logistic menunjukan ada data outliner dari 3 step pengujian, maka data outlier dikeluarkan.

Hasil pengujian descriptive statistic, menunjukkan nilai minimum variabel ukuran pemda sebesar 27,38, nilai maksimal 30,10 dan nilai standar deviasi sebesar 0.48985. Untuk variabel OPINI LKPD diketahui nilai minimum 0 dan nilai maksimal 1, dengan nilai standar deviasi sebesar 3,34094. Untuk variabel Efisiensi, diketahui nilai minimum 0 dan nilai maksimal 1, dengan nilai standar deviasi sebesar 0,32949.

Tabel 2 Model Summary

Pengaruh Ukuran Pemda Dan Tingkat Efisiensi Terhadap Opini Lkpd Studi Pada Pemerintahan Daerah Lampung

		Cox & Snell R	Nagelkerke R
Step	-2 Log likelihood	Square	Square
1	47.416 <sup>a</sup>	.258	.476

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: output spss olah data

Uji Kelayakan Model. Berdasarkan tabel 2 model summary, diketahui nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,476 (47,6%). Hal ini menggambarkan bahwa selain variabel ukuran pemda dan kinerja keuangan, masih ada variabel lain diluar penelitian yang mempengaruhi OPINI, sebesar 52,4%.

Tabel 3 Persamaan Variabel

								95% EXP(B)	C.I.for
		В	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup>	ln_X1	6.361	1.778	12.80	1	.000	579.069	17.771	18869.06
				8					3
	DM_X2	-2.515	1.009	6.208	1	.013	.081	.011	.585
	Constant	-177.275	49.919	12.61	1	.000	.000		
				1					
- X7	1. (.)			1					

a. Variable(s) entered on step 1: ln\_X1, DM\_X2.

Sumber: output olah data SPSS

201	15	2016	2016 2017		2018		2019		
efisien	opini	efisien	opini	efisien	opini	efisien	opini	efisien	opini
pesisir barat	tmp	bandar lampung	wtp	tanggamus	wtp	tanggamus	wdp	pesisir barat	wdp
		tanggamus	wtp					tanggamus	wtp
		lampung timur	wdp					lampung timur	wtp

Sumber: data diolah

Uji Regresi Binery Logistic. Berdasarkan tabel 4 persamaan regresi binery logistic, menunjukkan nilai persamaan sbb:

$$Y = -177,275 + 6,361X_1 - 2.515X_2$$

Pengujian hipotesis untuk memperlihatkan seberapa besar pengaruh antara variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Hasil pengujian hipotesis pada tabel 3 diketahui tingkat signifikasi untuk  $X_1$  ke Y sebesar 0,000 dan  $X_2$  ke Y sebesar 0,013. Semuanya dibawah 0,005, dengan demikian dapat disimpulkan variable ukuran pemda dan kinerja pemda berpengaruh terhadap variable opini LKPD.

Pengaruh Ukuran Pemda Dan Tingkat Efisiensi Terhadap Opini Lkpd Studi Pada Pemerintahan Daerah Lampung

Hipotesis pengaruh ukuran pemda terhadap opini LKPD. Semakin besar ukuran pemerintah daerah yang di proxy dengan nilai total aset, mengidentifikasi pengelolaan keuangan pemda kompleks. Walaupun kompleks pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada stakeholders terutama Masyarakat yang disampaikan melalui laporan keuangan, menunjukkan salah satu bukti bahwa Pemda ingin menunjukkan pengelolaan asset telah dilakukan dengan baik, apalagi jika berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan BPK RI diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), semakin memperkuat pemda telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai standar terutama dalam pengelolaan asset.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan ukuran pemda berpengaruh positif terhadap Opini LKPD, artinya semakin besar ukuran pemda yang di proxy dengan total aset terbukti mampu mendapatkan Opini WTP. Selama masa pengamatan penelitian, periode tahun 2015 sampai 2021 menunjukkan, Pemda yang total asset setiap tahun ada peningkatan, mampu mempertahankan opini WTP. Dari data pemngamatan ditemukan, untuk pemda yang memiliki nilai aset 2-5 M selama 5 tahun mampu mendapatkan opini LKPD WTP, tetapi untuk asset dibawah 2 M pernah mendapatkan opini LKPD selain WTP. Dengan demikian dapat dinyatakan Hipotesis Pertama diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Christina & Wahyudi, 2022).

Hipotesis kedua, berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai signifikasi 0,013, dibawah nilai 0,05 (5%), dapat dikatakan hipotesis pengaruh kinerja pemda yang di prozy dengan tingkat efisiensi terhadap opini LKPD ditolak, karena hipotesis yang diajukan sesuai teori, arah hubungan positif sedangkan nilai pengaruh yang dihasilkan menunjukkan arah yang negative (-2,515). Hal ini menunjukkan walaupun tingkat efisiensi pemda dikategorikan belum efisien, opini LKPD pemda bisa mendapatkan opini WTP. Rasio efisiensi memberikan gambaran semakin tinggi rasio maka semakin buruk kinerja, sebaliknya semakin rendah rasio efisiensi menunjukkan kinerja yang baik. Jika rasio efisiensi tinggi, berarti belanja lebih besar dari pendapatan, dan jika rasio efisensi rendah, berarti pendapatan mampu menutupi belanja.

Berdasarkan pengamatan data selama periode 2015 sampai 2021. Pemda yang mampu mendapatkan kategori Efisien dapat dilihat pada table 4 Efisiensi VS Opini. Dari tablel 4 terlihat walaupun pemda mendapatkan kriteria efisien, opini LKPD ada yang WTP ada juga selain WTP, selain data di atas tidak ada pemda yang mendapatkan kategori efisien lagi, tetapi opini LKPD banyak yang WTP. Hal ini membuktikan, tingkat efisiensi pengelolaan belanja dibandingkan dengan pendapatan walaupun ada hubungannya, namun arahnya negative, karena banyak pemda yang mendapatkan opini WTP pada LKPD namun untuk tingkat efisiensi dikategorikan non efisien. Penjelasan yang bisa ditambahkan adalah, opini WTP diberikan BPK bukan karena pemda tidak berkinerja dengan baik secara keseluruhan, namun ada pertimbangan lain dalam pemberian opini, seperti kepatuhan terhadap regulasi, optimalisai penerapan spip, dan penyajian sesuai standar. Dan untuk kinerja pemda tidak hanya dengan mengukur rasio efisiensi saja. Sebaiknya juga menambahkan rasio lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Panggabean, 2019), Nur Anita Chandra Putry, Rudy Badrudin 2017. Penelitian terkait efisiensi terhadap opini menunjukkan hasil tidak berpengaruh telah dilakukan juga oleh (Hamidayanti & Wardani, 2018). Penelitian (Destin & Arofah, 2021) menunjukkan hipotesis ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini BPK, dengan demikian ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap opini BPK.

## **SIMPULAN**

Pengaruh Ukuran Pemda Dan Tingkat Efisiensi Terhadap Opini Lkpd Studi Pada Pemerintahan Daerah Lampung

Ukuran Pemda yang di proxy dengan ln total aset, berpengaruh positif terhadap opini LKPD. Kinerja pemda yang diproxy dengan dummy tingkat efisiensi, berpangaruh negative terhadap opini LKPD. Berdasarkan nilai Negelkerke diketahui masih ada factor-faktor lain diluar penelitian, maka, disarankan untuk peneliti selanjutnya menambah variabl lain, seperti menambah proxy karakteristik pemda (kemakmuran daerah, ketergantungan daerah dengan pusat, dll). Variable kinerja pemda (rasio efektifitas, kemandirian, belanja, pertumbuhan, dll)

Aset pemda bisa jadi di danai dari pajak dan retribusi yang disetorkan oleh masyarakat. Untuk itu pemda diharapkan mengelola, memanfaatkan asset dengan baik, dalam menjalankan operasional pemerintahan. Diharapkan dengan jumlah asset yang besar dapat meningkatan pelayanan public lebih baik lagi. Terus mengelola keuangan daerah dengan baik, sehingga mampu mempertahankan opini WTP atas LKPD.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Christina, M. W., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5076–5083.
- Destin, M. A., & Arofah, A. A. (2021). Determinasi Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini BPK. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, *14*(1), 113–122.
- Erniati, E., Kumbangsila, E. O., Mukhtar, A. S., Kastanya, H., Harlin, H., Darman, F., Rumihin, A., Hasan, N. H., & Amalia, Y. (2019). *Bunga rampai penelitian kebahasaan dan kesastraan*. Kantor Bahasa Maluku.
- Hamidayanti, L., & Wardani, M. K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(2), 685–697.
- Kurniawanto, H., Suhardjanto, D., & Agustiningsih, S. W. (2017). Corporate governance and corporate risk disclosure: Empirical evidence of non-financial companies listed in Indonesia stock exchange. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(4), 255.
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 151–159.
- Rosadi, S., & Okfitasari, A. (2019). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan waktu penyampaian laporan keuangan terhadap opini audit BPK. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(02), 148–157.
- Salsabila, R., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Ukuran Pemerintahan Daerah Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(1), 38–45.
- Suhardjanto, D., & Dewi, A. (2011). Pengungkapan risiko finansial dan tata kelola perusahaan: Studi empiris perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 15(1), 105–118.
- Widyanto, D. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Net Interest Margin (Nim) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. UNIMUS.
- Zhang, G., Chan, B., Samarina, N., Abere, B., Weidner-Glunde, M., Buch, A., Pich, A., Brinkmann, M. M., & Schulz, T. F. (2016). Cytoplasmic isoforms of Kaposi sarcoma herpesvirus LANA recruit and antagonize the innate immune DNA sensor cGAS. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(8), E1034–E1043.

Pengaruh Ukuran Pemda Dan Tingkat Efisiensi Terhadap Opini Lkpd Studi Pada Pemerintahan Daerah Lampung



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).